

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ISIS adalah singkatan dari *Islamic State of Irak and Syria*, sebuah organisasi militan yang sesuai dengan namanya, berasal dan bertempat di negara Irak dan Suriah. Namun begitu organisasi tersebut tidak diakui oleh kedua negara dan juga negara – negara dalam dunia internasional karena memiliki tujuan mendirikan negara baru berbentuk khilafah Islam secara paksa dengan melakukan kudeta terhadap pemerintah dan aneksasi wilayah negara yang berawal di Suriah dan Irak. Awal mula terbentuknya organisasi ISIS dibarengi oleh sejumlah kekacauan yang terjadi di Timur Tengah pasca invasi Amerika ke Irak, yang kemudian dilanjutkan dengan ketidak puasan akan kinerja pemerintah rezim Basar al Assad di Suriah. ISIS kemudian berperan sebagai jembatan bagi negara – negara Arab yang juga memiliki kepentingan untuk menggulingkan rezim Bashar al Assad.

Dalam perkembangannya ISIS kemudian memiliki tujuan untuk mengakuisisi pemerintahan atas umat Islam secara global dan menggantinya dengan pemerintahan berbasis kekhalifahan, dimana sistem pemerintahan umat Islam di seluruh dunia dipimpin dan terpusat oleh satu orang khalifah saja. Tujuan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu kekecewaan terhadap rezim pemerintahan yang ada dan juga cita – cita untuk mengembalikan lagi masa kejayaan umat Islam yang dicapai pada masa kekhalifahan yang dimulai dari masa kepemimpinan nabi Muhammad saw sebagai pemimpin bagi umat Muslim di seluruh dunia. Setelah nabi Muhammad saw wafat, kekhalifahan Islam kemudian berlanjut ke tangan khilafah Rasyidah, Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah

yang mengakhiri masa kekhalifahan umat Islam yang runtuh pada tahun 1924.

ISIS terus menunjukkan berbagai aktivitas teror dan non teror seperti pengeboman, eksekusi rakyat sipil, tentara maupun awak media, penculikan dengan meminta tebusan, pengelolaan ladang minyak, dan perdagangan narkoba sebagai cara untuk mendapat dana operasional organisasi. Perlawanan – perlawanan ISIS terhadap tentara Irak terus terjadi. Hingga ISIS berhasil menguasai kota Raqqa di Suriah pada tahun 2013 dan kota Mosul di Irak tahun 2014. Namun begitu nampaknya kejayaan ISIS tidak bertahan lama. Terbukti pada bulan Juni tahun 2017, militer Irak mendeklarasikan kemenangan mereka atas ISIS di kota Mosul (Indonesia, Irak :'Perang melawan ISIS telah berakhir', 2017). Tersiar pula kabar akan kematian pemimpin ISIS pada saat itu yaitu Abu Bakar Al- Baghdadi. Dalam laporan saluran TV Al Sumaria, ISIS mengeluarkan pernyataan tentang tewasnya khalifah mereka beserta pengumuman nama khalifah mereka yang baru (Berlianto, 2017).

Keruntuhan organisasi kekhalifahan ISIS hampir mencapai puncaknya. Namun kondisi ini tampak telah dipersiapkan secara matang oleh organisasi terorisme tersebut. Kehilangan wilayah kekuasaan yang signifikan tak membuat geliat perkembangan organisasi ISIS terhenti. Kekuatan ISIS seperti persediaan senjata dan pasukan yang tetap menolak untuk menyerah menjadikan ISIS masih memiliki potensi untuk terus melanjutkan penyebaran paham radikal dan ancaman terorisme di berbagai wilayah di dunia. Dalam mengantisipasi masalah terkait hilangnya wilayah kekuasaan yang pasti, ISIS telah terlebih dahulu bergerak membangun “lahan” untuk tetap menghidupkan aktivitas, meskipun perlahan, namun nilai – nilai organisasi dan ideologinya berhasil masuk ke sejumlah wilayah di Asia termasuk Afghanistan, Pakistan, Filipina, hingga Indonesia. Berawal dari perlawanan terhadap pemerintahan dalam negeri, ISIS menjadi

salah satu faktor besar penyebab terjadinya instabilitas kawasan Timur Tengah, dan terganggunya sistem pertahanan dan keamanan negara di dunia pada umumnya.

Salah satu strategi yang dilancarkan ISIS dalam menyebarluaskan paham radikal adalah dengan desentralisasi kekuatan, yaitu strategi krusial yang efektif bagi ISIS dalam proses penyebaran paham radikal sebagai ideologi dasar dalam proses perwujudan negara dengan sistem pemerintahan khalifah. ISIS memecah dan menyebar kekuatan ke berbagai wilayah di dunia yang mana kekuatan tersebut akan bertindak sebagai *aspiring branch* dalam membangun paham radikal. Hal ini dapat dianalogikan dengan fenomena diaspora masyarakat suatu negara di negara lainnya yang kemudian menciptakan adanya asimilasi, hingga hegemoni budaya.

Seperti yang telah dikemukakan, Indonesia turut menjadi salah satu negara (baca: media) yang dinilai kondusif dalam proses penanaman paham radikal yang dibawa oleh ISIS. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Muslim, dan kondisi masyarakat serta negara Indonesia sendiri yang memiliki sejarah panjang tentang aksi separatisme hingga saat ini. Dalam perkembangannya, ISIS tengah mengaplikasikan strategi desentralisasi kekuatan tersebut di Indonesia, yang mana tanda – tandanya dapat dilihat dari mulai munculnya organisasi – organisasi terorisme dan radikal tingkat sel, serta meningkatnya aktivitas terorisme di Indonesia pada tahun 2014 hingga saat ini. Menjadi penting untuk mengetahui proses pengaplikasian strategi desentralisasi kekuatan ISIS tersebut demi mencegah menyebarnya paham radikalisme dalam skala yang lebih besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka didapatkan rumusan masalah tentang “Bagaimana proses desentralisasi kekuatan ISIS dalam penyebaran paham radikalisme di Indonesia tahun 2014-2018 dilaksanakan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pertama yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mendapat dan memberikan pemahaman terkait proses desentralisasi kekuatan ISIS dalam penyebaran paham radikalisme di Indonesia, sehingga pemahaman tersebut secara praktis dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyebaran paham radikalisme di Indonesia dalam skala yang lebih besar. Tujuan penelitian kedua adalah untuk menambah pengetahuan di bidang kajian strategis dan organisasi internasional dalam ilmu hubungan internasional.

D. Kerangka Pemikiran

Uraian mengenai kasus dalam rumusan masalah akan dijelaskan menggunakan teori dan konsep yang diambil dari pemikiran para ahli ilmu hubungan internasional, yaitu konsep totalitarianisme oleh Hans Morgenthau, strategi dan taktik menurut Carl Von Clausewitz dan Gregory Foster, serta konsep hegemoni oleh Antonio Gramsci. Teori dan konsep tersebut dinilai sebagai kerangka berpikir paling relevan untuk membantu penulis dalam menganalisa kasus penelitian.

Hans J Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* (1973) menjelaskan bahwa *power* atau kekuasaan adalah sebuah cara untuk mempengaruhi tingkah laku dan

pikiran pihak lain (Morgenthau, 1973). Kontrol yang dimiliki seseorang tersebut tentu digunakan untuk mencapai kepentingan dari pemilik sumber kontrol itu sendiri. Sehingga pada dasarnya pihak pemimpin membutuhkan kekuasaan untuk mendapatkan legitimasi atas pihak yang dipimpin untuk mempermudah proses pencapaian tujuan. Proses mencapai kekuasaan dan legitimasi tersebut dikenal juga sebagai perjuangan demi kekuasaan atau *struggle for power*.

Sementara itu, totalitarianisme merupakan salah satu bentuk metode dalam mencapai legitimasi dan kekuasaan melalui sistem pemerintahan. Totalitarianisme menurut Morgenthau adalah sistem pemerintahan total dengan superioritas pemerintah itu sendiri yang terpusat oleh satu pemimpin saja (Morgenthau, 1973). Namun begitu, sistem totalitarian rentan terhadap kelaliman karena adanya absolutisme oleh pemerintah pusat yang memungkinkan terjadinya pelanggaran – pelanggaran norma dan nilai yang legal (Morgenthau, 1973).

Morgenthau dalam bukunya *Servant or Master and Truth and Tragedy* yang dikutip oleh Felix Johannes Rösch dalam *Hans J. Morgenthau, the “marginal man” in International Relations. A “Weltanschauungsanalyse”*, mengasumsikan bahwa totalitarianisme merupakan bentuk pemerintahan gaya baru yang memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah:

1. Kedaulatan yang didapatkan dari totalitarianisme adalah kedaulatan yang cenderung keras dan opresif. Totalitarianisme memiliki kesempatan dan otoritas untuk sepenuhnya membungkam kritik dari pihak yang diperintah. Kepemilikan senjata api akan dibatasi atau bahkan dilarang, sehingga hanya pihak pemerintah yang secara legal dapat memiliki dan menggunakan senjata api. Hal ini menimbulkan paham bahwa tindakan keras dapat digunakan oleh aparat keamanan

secara sah. Pemerintah totalitarianis juga mampu memonopoli sektor ekonomi sebagai kekuatan politik yang baru dan dengan kesuksesan ekonomi, pemerintah mampu meningkatkan pengaruhnya di kalangan masyarakat.

2. Berkaitan dengan karakteristik di atas, pada akhirnya totalitarianisme mampu mengendalikan opini publik dalam berbagai cakupan. Totalitarianisme secara teknis mampu menggunakan media dan perangkat komunikasi untuk menyebarkan doktrin bagi subyek yang didoktrinasi dengan menciptakan perangkat propaganda. Menurut Morgenthau, pemerintah totalitarian mampu mengolah bahasa dan mentransmisikan pernyataan mereka. Bagaimanapun, penyebaran indoktrinasi benar – benar terjadi dalam pemerintahan totalitarianisme. (Rösch, 2011)

Yang menarik adalah, totalitarianisme mampu mengarahkan pandangan politik masyarakatnya menuju homogenitas. Totalitarianisme kemudian mampu membangun ideologi baru sebagai alat legitimasi kekuasaannya dengan tujuan untuk memusatkan perhatian kepada rakyatnya. Namun di sisi lain, totalitarianisme menghapus kebebasan rakyatnya dalam bersuara maupun bertindak.

Dalam mengkaji kasus diatas, konsep totalitarianisme dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena desentralisasi kekuatan yang dilakukan ISIS. Sebagai kelompok kepentingan, ISIS memiliki upaya untuk mencapai kekuasaan demi mendapatkan penerimaan dan pengakuan umat Muslim secara global atas pemerintahan berbasis kekhilafahan. Terutama setelah ISIS mengalami kondisi dimana kekuasaan terdahulu telah runtuh, ISIS berupaya untuk tetap mempertahankan dan mencapai kekuasaan baru demi eksistensi kekuatan kelompok. Dengan kekuatan dan kekuasaan, keuntungan serta tujuan –

tujuan akan dengan mudah didapatkan dan dominasi dari pihak lain dapat diminimalisir (Robert Jackson, 2013).

Demi mencapai legitimasi secara global, upaya yang digunakan ISIS adalah penyebaran propaganda dan doktrinasi, yang mana merupakan bentuk dari *soft power* yang dimiliki ISIS bukan sebagai negara, namun sebagai organisasi internasional. Upaya ini berkaitan dengan karakteristik totalitarianisme nomor dua, yaitu pembentukan sistem pemerintahan ISIS yang mampu menyebarkan ideologi mereka melalui doktrinasi dan propaganda untuk mengendalikan opini publik dan pikiran subjek propaganda.

Penyebaran doktrinasi dan propaganda dilakukan ISIS dengan strategi desentralisasi. Dalam militer, desentralisasi disebut juga sebagai strategi *Auftragstaktik*, atau dapat diartikan secara harfiah sebagai pendistribusian kewenangan kepada pihak subordinat yang disebarkan jauh dari pusat, lokasi, atau pemerintahan untuk bertindak secara mandiri yang dimaksudkan untuk melancarkan misi dan tetap memenuhi tujuan pemimpin pusat (Gunther, 2015). Strategi ini pertama kali digunakan oleh para tentara Jerman pada tahun 1888 untuk memerangi Louis Napoleon Bonaparte di Rhine, yang di kemudian hari dikembangkan dan digunakan sebagai strategi militer Jerman untuk Perang Dunia II, seperti penjelasan Gunther dalam bukunya *Auftragstaktik: The Basis For Modern Military Command* yang menyatakan bahwa, “*The Germans used this method of task oriented, fragmented command through the first half of World War II; German doctrine used the term Auftragstaktik to describe it.*”

Sebagai kelompok kepentingan berskala internasional, ISIS mempersiapkan diri dengan sangat baik yang mana upaya tersebut terwujud pada strategi dan taktik ISIS dalam mencapai tujuan. Clausewitz mendefinisikan strategi dan taktik menjadi dua hal yang berbeda dalam arti sempit, yang mana strategi adalah cara untuk memenangkan peperangan, sedangkan taktik adalah cara untuk memenangkan pertarungan (scholastic.com,

2018). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sidik Jatmika dalam bukunya *Pengantin Bom*, dimana taktik merupakan komponen yang digunakan untuk menyusun sebuah strategi (Jatmika, *Pengantin Bom: Sebuah Novel Sosio-Kriminologi*, 2009). Sedangkan strategi sendiri menurut Foster adalah rencana tindakan yang terukur untuk mencapai sesuatu dengan langkah – langkah sistematis (John Baylis, 2007). Langkah – langkah sistematis tersebut kemudian dapat dipahami sebagai taktik. Jika kedua pengertian tersebut dikaitkan maka strategi dapat dianalogikan sebagai sebuah jembatan menuju kemenangan perang, sedangkan taktik adalah kayu – kayu penyusun jembatan yang digunakan untuk menuju kemenangan perang.

Dalam hal ini, desentralisasi merupakan salah satu strategi ISIS dalam mencapai tujuannya, yaitu penyebaran ideologi serta nilai – nilai organisasi demi mendapatkan legitimasi umat muslim dan masyarakat dunia pada umumnya. Untuk melaksanakan strategi desentralisasi tersebut, ISIS juga memiliki berbagai macam taktik yang diimplementasikan sebagai langkah – langkah untuk mencapai tujuan dibuatnya strategi desentralisasi itu sendiri. Keseluruhan strategi dan taktik ISIS terkait desentralisasi kekuatan akan dijelaskan pada bab – bab selanjutnya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, upaya ISIS dalam mendapatkan kekuasaan melalui desentralisasi kekuatan bertujuan untuk menciptakan hegemoni tentang ideologi, nilai, dan norma yang dijunjung oleh organisasi ISIS itu sendiri. Dampak yang diakibatkan dari upaya ISIS tersebut kemudian menjadi wujud dari hegemoni nilai dan norma organisasi ISIS yang berusaha diciptakan dan disebar luaskan. Hegemoni sendiri merupakan sebuah konsep yang muncul dalam konteks kontrol sosial politik dimana hegemoni menurut Antonio Gramsci dalam bukunya *Selection from Prison Notebooks* merupakan penguasaan dengan nilai moral intelektual, politik, dan ideologi sehingga pihak yang dikuasai mengakui nilai – nilai dan norma dari pihak yang menguasai dengan kesadaran

dan persetujuan. Hegemoni tidak tersebar dalam masyarakat dengan mudah, untuk itu diperlukan adanya agen – agen penyebar ideologi yang menjadi pion di luar wilayah pusat ideologi itu sendiri (Faruk, 1994). Hegemoni Gramsci sampai kepada titik dimana individu yang dihegemoni telah sadar sepenuhnya terhadap tujuan hegemoni yang ada sehingga ia rela melakukan apapun demi mencapai tujuan hegemoni tersebut. Hegemoni menjadi berbahaya karena kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa dirinya telah dihegemoni. Dengan menghegemoni pihak di luar organisasi pusat, tentunya akan memberikan banyak kemudahan bagi ISIS untuk mencapai tujuannya.

E. Hipotesis

ISIS sebagai kelompok kepentingan berupaya mempertahankan kekuasaan dengan melakukan strategi desentralisasi kekuatan di sejumlah wilayah di dunia termasuk Indonesia yang meliputi langkah langkah sebagai berikut:

1. ISIS menyebarkan propaganda dan doktrinasi melalui media komunikasi dan informasi online maupun offline seperti web, media sosial, surat kabar, hingga kegiatan – kegiatan keagamaan.
2. ISIS melakukan perekrutan tentara jihad dari Indonesia yang kemudian dilatih di Irak atau Suriah.
3. ISIS mengembalikan tentara jihad asal Indonesia ke negaranya sebagai pion hegemon radikalisis ISIS di Indonesia.

F. Jangkauan Penelitian

Batas penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan timeline dimulainya peningkatan aktivitas organisasi radikal ISIS hingga tahun saat penelitian ini dilakukan (2014 – 2018). Dimana pada tahun 2014 mulai muncul tanda – tanda

masuknya pengaruh radikalisasi organisasi ISIS ke Indonesia, yaitu munculnya beberapa organisasi teroris tingkat sel. Aparatur negara banyak membekuk anggota jaringan terduga teroris (jaringan kelompok ISIS). Pada tahun 2014 diketahui telah terdapat kurang lebih 55 orang tahanan terorisme yang berhasil ditangkap, para tahanan tersebut mayoritas terbukti memiliki senjata api dan atribut – atribut kelompok terorisme ISIS (BBC, DPO Terorisme Pendukung ISIS Ditangkap, 2014).

Aktivitas teror terus terjadi dengan intensitas yang fluktuatif dari tahun 2014 hingga 2018 dan cenderung masif pada tahun 2016 dan 2018. Pada tahun 2018 sendiri terdapat total 5 teror bom dari bulan Februari hingga Mei. Selain itu ditemukan banyak kasus mengenai warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Irak atau Suriah melewati negara – negara tetangga Suriah. Sedangkan topik yang diambil dibatasi hanya pada proses desentralisasi kekuatan ISIS dalam penyebaran ideologi radikal di Indonesia. Bagaimana awal mula strategi tersebut direncanakan, pengaplikasian strategi, serta taktik – taktik apa saja yang digunakan ISIS dalam menyebarkan ideologinya di Indonesia. Jangkauan penelitian tersebut akan membantu penulis agar tetap fokus pada pembahasan utama dan mencegah pembahasan yang terlalu luas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang kompatibel untuk digunakan pada penelitian bersifat deskriptif. Analisa yang mendalam dan fakta di lapangan menjadi sumber data yang digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti sedetail mungkin.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif didapatkan dengan cara:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki korelasi terhadap topik penelitian. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan memberikan pertanyaan tambahan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari narasumber.

b. Studi Pustaka

Penulis menggunakan referensi yang didapatkan dari buku, jurnal – jurnal, surat kabar, maupun media yang memiliki informasi terkait dengan topik penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik deskriptif akan digunakan oleh penulis mengingat jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif. Dengan kata lain penulis akan memberikan penjelasan terkait dengan wujud upaya desentralisasi kekuatan ISIS yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan data non angka dan fakta lapangan yang relevan.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah proses pelaksanaan strategi desentralisasi

kekuatan ISIS itu sendiri beserta taktik – taktik pendukung yang dipraktekkan di Indonesia. Untuk itu penulis dapat membutuhkan informasi dari media cetak, narasumber yang memiliki korelasi dengan obyek seperti pemerhati sosial, maupun aparat penegak hukum khususnya di bidang terorisme.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian akan dibagi menjadi 5 bab dengan beberapa sub-bab yang akan menjelaskan tentang:

Bab 1 berisi uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang informasi yang berakaitan dengan ISIS secara menyeluruh sebagai organisasi teroris. Termasuk membahas tentang sejarah pembentukan, keorganisasian, serta cara ISIS mencapai kepentingan kelompoknya.

Bab 3 berisi pengenalan strategi desentralisasi kekuatan ISIS. Bermula dari proses perumusan strategi dan taktik desentralisasi, seluruh rangkaian proses pelaksanaan strategi dan taktik desentralisasi oleh ISIS, hingga awal mula penyebaran doktrinasi ISIS di Indonesia.

Bab 4 menjelaskan tentang pengaplikasian strategi dan taktik desentralisasi kekuatan ISIS di Indonesia. Perekrutan, pemulangan kembali tentara jihad ke Indonesia dan hegemonisasi radikalisme ISIS di Indonesia.

Bab 5 berisi tentang keseluruhan inti materi dan kesimpulan yang akan menjadi penutup penelitian.